DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adisaputra, W. P. (1976). *Pengantar Hukum Administrasi*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Allaby, M. (1979). *Dictionary of The Environment*. London: The Mac Millan Press, Ltd.
- Amsyari, f. (1977). *Prinsip-Prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Danusaputro, M. (1978). *Hukum Pencemaran dan Usaha Merintis Pola Pembangunan Hukum Pencemaran Nusantara*. Bandung: Litera.
- Diantha, I. M. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Efendi, A. (2018). *Instrumen Hukum Lingkungan Sebagai Sarana Pencegahan*.
- Fandeli, C. (2000). *Audit Lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hadjon, P. M. (1994). *Pengantar Hukum Administrasi*. Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Hidup, M. L. (2005). *Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Laporan RKL dan RPL*. Jakarta.
- Husein, H. M. (1992). *Berbagi Aspek Hukum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhjad, H. (2015). *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Peeters, M. (2004). *Elaborating Integration of Environment Law : The Case of Indonesia, Workshop Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- Prins, K. A. (1976). *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Adutya Bhakti.
- Santoso, T. I. (2009). *Politik Hukum AMDAL, AMDAL Dalam Perspektif Hukum Lingkungan dan Administratif*. Malang: Setara Press.
- Siahaan, N. (2004). *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.

- Simorangkir, J. (1962). *Pelajaran Hukum Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soemarwoto, O. (2007). *Ekologi Pembangunan dan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Djambatan.
- Soemarwoto, R. G. (1996). *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudharto, H. (2005). *Metode Penelitian Lingkungan Bidang Sosial*. Semarang: Undip Press.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: PT. Alfabet.
- Sunggono, B. (2006). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Suteedi, A. (2015). *Hukum Perizinan : Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Utama, I. M. (n.d.). *Hukum Lingkungan : Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: Toko Buku.
- Utrech, E. (1959). *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Penerbit Balai Buku Ictiar.
- Wijoyo, S. (1997). Deregulating Licencing to Improve Environmental Control and Monitoring in Indonesia. *Journal of Environmental Law*, II, 99.
- Yudiono. (2015). *Metode Penelitian*. Jakarta: Erlangga.

Jurnal

- Sundari, S. (2005). *Implementasi Instrumen Hukum Lingkungan dan Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Dalam Rangka Revisi UUP LH*. Surabaya: Airlangga.
- Yoanda, Yofi. *Pelaksanaan Pemberian Izin Lingkungan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Oleh Badan Lingkungan Hidup di Kota Pekanbaru Tahun 2016*. JOM FISIP Vol 4 Nomor 2. (2017) : 1-18.
- Zuhri, Mohd. *Efektifitas Pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Siak*. (2012) : 1-13.

Kitab Undang-Undang dan Peraturan Lainnya

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2020 tentang Dokumen Lingkungan Hidup
10. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90 PK/TUN/2016
11. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Laporan RKL dan RPL.
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL, UKL-UPL atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki AMDAL.
15. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen Oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah.

Website

Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2022). Retrieved Januari 2, 2022, from <http://kbbi.web.id/lingkungan>

Wawancara

Bapak Yuniarto Penegakan Hukum Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus PT. Semen Gresik). Hasil wawancara pribadi. 9 Maret 2022. Lembaga Bantuan Hukum Semarang

Bapak Sukarman, SH., MH. Penegakan dan Sanksi Hukum Pelanggaran Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus PT. Semen Gresik). Hasil wawancara pribadi. 18 Maret 2022. Lembaga Bantuan Hukum Semarang.